

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 11, December 2024, P. 982-986
Licenced By Cc By-Sa 4.0
E-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14504412>

Uang dan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Fitri Amalia¹, Maisyaro Kholida², Muhammad Albahi³
^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: Ftramaliaa@gmail.com, maisyarokholida12@gmail.com, muhammad.albahi@uin-suska.ac.id

Abstract

This study discusses the role of Islamic money and financial institutions in the Indonesian macro economy, focusing on their interaction with monetary policy and economic stability. The study uses a qualitative method with a literature study approach. The findings show that the Islamic financial system offers an alternative based on sharia principles that avoid interest (riba), with instruments such as profit sharing and asset-based financing. Islamic financial institutions play a significant role in supporting inclusive economic growth, reducing inflation, and encouraging monetary stability through instruments such as sukuk. In addition, these financial institutions have great potential in creating sustainable economic development, especially in countries with a majority Muslim population, including Indonesia.

Keywords: Money, Islamic Financial Institutions, Monetary Policy, Macroeconomics

Article Info

Received date: 19 November 2024

Revised date: 27 November 2024

Accepted date: 10 December 2024

PENDAHULUAN

Uang dan lembaga keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam sistem perekonomian suatu negara. Dalam konteks perekonomian global, uang bukan hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai satuan pengukur nilai dan sarana penyimpanan kekayaan. Lembaga keuangan, baik bank maupun institusi lainnya, berperan dalam mengalirkan dana dari pihak yang memiliki surplus ke pihak yang membutuhkan dana, serta memberikan layanan keuangan yang mendukung kelancaran perekonomian. Namun, peran ini semakin kompleks seiring dengan perkembangan ekonomi yang semakin terhubung secara global, serta adanya tuntutan untuk mengakomodasi berbagai sistem keuangan yang berbeda, salah satunya adalah sistem keuangan Islam.

Sistem keuangan Islam, yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, memberikan alternatif terhadap sistem keuangan konvensional yang dominan saat ini. Dalam sistem keuangan Islam, praktik bunga (riba) yang menjadi ciri khas dalam sistem konvensional dilarang, dan digantikan dengan prinsip-prinsip seperti bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), jual beli yang sah (murabahah), serta pembiayaan berbasis aset (ijarah). Meskipun sistem keuangan Islam telah berkembang pesat, namun masih banyak tantangan yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut, baik dari segi regulasi, infrastruktur, maupun pemahaman masyarakat. Salah satu isu utama yang relevan dalam diskusi ini adalah bagaimana uang dan lembaga keuangan Islam dapat berfungsi secara optimal dalam kerangka makroekonomi.

Dalam konteks makroekonomi, uang dan lembaga keuangan tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tetapi juga memiliki dampak yang luas terhadap stabilitas ekonomi, pengendalian inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Peran lembaga keuangan Islam dalam makroekonomi menjadi semakin relevan karena banyak negara, termasuk negara dengan mayoritas penduduk Muslim, mulai melihat pentingnya pengembangan sektor keuangan berbasis syariah. Di Indonesia sistem perbankan syariah telah berkembang pesat dalam dua dekade terakhir dengan hadirnya berbagai lembaga keuangan syariah yang memberikan alternatif pembiayaan tanpa bunga. Namun, meskipun perkembangan ini menjanjikan, tantangan dalam integrasi sistem keuangan Islam dengan sistem ekonomi makro tetap menjadi isu penting untuk diteliti lebih lanjut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran uang dan lembaga keuangan Islam dalam perekonomian makro Indonesia, dengan fokus pada bagaimana interaksi antara keduanya dapat mempengaruhi kebijakan moneter dan kestabilan ekonomi. Penelitian ini akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan kunci, yaitu, Bagaimana uang dan lembaga keuangan Islam dapat berfungsi dalam perekonomian makro dan apa saja tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan Islam dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah di tengah perkembangan ekonomi global serta bagaimana

pengaruh lembaga keuangan Islam terhadap inflasi, kebijakan moneter, dan pertumbuhan ekonomi. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan baru bagi para pembuat kebijakan, praktisi ekonomi, serta akademisi dalam memahami peran lembaga keuangan Islam dalam perekonomian makro.

Penelitian terkait uang dan lembaga keuangan Islam dalam kerangka makroekonomi sudah cukup banyak dilakukan, namun sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek mikroekonomi, seperti sebuah studi yang dilakukan oleh **Al-Tamimi & Al-Qudah (2020)** yang meneliti dampak kebijakan moneter yang diterapkan oleh negara-negara dengan sektor keuangan syariah yang berkembang. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, kebijakan moneter yang lebih fleksibel, seperti penggunaan instrumen keuangan syariah untuk likuiditas, lebih menguntungkan bagi perekonomian negara dengan sektor keuangan syariah yang berkembang. Namun, dalam jangka pendek, kebijakan moneter yang ketat tetap mempengaruhi pertumbuhan lembaga keuangan syariah, terutama dalam hal pembiayaan. Beberapa studi lain, seperti yang dilakukan oleh **Bashir & Khairuddin (2022)** menemukan bahwa lembaga keuangan Islam dapat berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memfokuskan pembiayaan kepada sektor-sektor yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Penelitian ini mengusulkan penggunaan sukuk hijau dan instrumen keuangan syariah lainnya sebagai solusi untuk pembiayaan berkelanjutan di negara-negara dengan ekonomi berkembang. Penelitian yang dilakukan oleh **Abdullah & Mohamed (2020)** dalam penelitiannya mengenai integrasi sistem keuangan Islam dalam ekonomi global menyimpulkan bahwa lembaga keuangan Islam dapat memberikan kontribusi terhadap stabilitas ekonomi global dengan menawarkan alternatif pembiayaan yang tidak mengandalkan bunga dan spekulasi.

Namun, penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Pertama, penelitian ini akan lebih fokus pada uang dan peran lembaga keuangan Islam terhadap kebijakan moneter dan makroekonomi di Indonesia, dengan mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang unik di negara ini. Kedua, penelitian ini juga akan membahas lebih dalam tentang interaksi antara uang, lembaga keuangan Islam, dan kebijakan pemerintah dalam menciptakan perekonomian yang berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pengembangan teori dan praktik dalam sektor keuangan Islam, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi pengembangan ekonomi Islam di Indonesia dan negara-negara dengan populasi Muslim yang besar. Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya kajian tentang peran uang dan Lembaga keuangan Islam dalam makroekonomi dengan pendekatan yang lebih komprehensif, mengingat pentingnya sektor ini dalam menciptakan stabilitas ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

KAJIAN PUSTAKA

1. Uang dalam system keuangan islam

Uang, dalam sistem ekonomi Islam, tidak hanya dipahami sebagai alat tukar dan pengukur nilai, tetapi juga sebagai instrumen yang memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang mendalam. Uang dalam konteks ini harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, yang menekankan keadilan, keberlanjutan, dan transparansi. Menurut **Zubair Hassan (2019)** ia mengungkapkan bahwa uang dalam ekonomi syariah adalah alat tukar yang sah yang harus digunakan untuk tujuan yang sah pula, dengan menghindari praktik riba dan spekulasi. Hassan menyatakan bahwa uang dalam ekonomi Islam memiliki dua fungsi utama pertama, sebagai medium pertukaran yang digunakan dalam transaksi yang sah dan bermanfaat. kedua, sebagai alat untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Uang dalam ekonomi syariah berperan sebagai alat yang memfasilitasi transaksi ekonomi dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan, berbeda dari pandangan konvensional yang sering kali mengaitkan uang dengan kapital dan keuntungan.

2. Lembaga Keuangan Islam

Lembaga keuangan Islam yang mengikuti hukum Syariah Islam dikenal dengan sebutan Lembaga Keuangan Syariah. Organisasi keuangan yang sesuai syariah tidak boleh terlibat dalam maisir, gharar, atau riba. Hal-hal ini dilarang keras, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Menurut Mardani 2017 Lembaga Keuangan Syari'ah adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah Islamiah. Operasional lembaga keuangan Islam harus menghindari dari riba, gharar dan maisir. Hal-hal tersebut sangat diharamkan dan sudah

diterangkan dalam AlQuran dan Al- Hadist. Tujuan utama mendirikan lembaga keuangan Islam adalah untuk menunaikan perintah Allah dalam bidang ekonomi dan muamalah serta membebaskan masyarakat Islam dari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama Islam. lembaga keuangan syariah menekankan pada aspek moralitas, keadilan sosial, dan kepatuhan terhadap hukum Islam dalam operasional dan transaksi keuangannya. Sementara itu, lembaga keuangan konvensional lebih fokus pada keuntungan finansial tanpa mempertimbangkan nilai-nilai agama atau sosial dalam pengambilan keputusan. Di Indonesia Lembaga keuangan Islam memiliki peran multifaset yang mencakup penyediaan pembiayaan, pengelolaan aset, jasa perbankan, kontribusi terhadap pembangunan ekonomi, serta edukasi masyarakat. Dengan pertumbuhan aset keuangan berbasis syariah yang terus meningkat, Lembaga keuangan islam atau Lembaga keuangan syariah (LKS) diharapkan dapat terus berkontribusi dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan

3. Lembaga Keuangan Islam Terhadap kebijakan Moneter dan Inflasi

Menurut Muana Nanga (2019), kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan suku bunga guna mencapai stabilitas ekonomi. Kebijakan ini bertujuan untuk mempengaruhi inflasi dan pertumbuhan ekonomi dengan cara mengontrol likuiditas di pasar. Sementara itu, Rusdi Rustandi (2019) menyatakan bahwa kebijakan moneter dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu kebijakan kuantitatif dan kebijakan kualitatif. Kebijakan kuantitatif berfokus pada pengaturan jumlah uang beredar melalui instrumen seperti operasi pasar terbuka, politik diskonto, dan giro wajib minimum. Kebijakan moneter merupakan alat vital bagi pemerintah dan bank sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi. Dengan memahami berbagai instrumen dan pendekatan yang digunakan dalam kebijakan ini, diharapkan dapat tercapai tujuan makroekonomi yang lebih baik, termasuk pengendalian inflasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan ini dalam konteks perubahan kondisi ekonomi global dan domestik.

Inflasi dapat didefinisikan sebagai kenaikan harga-harga barang dan jasa secara terus-menerus dalam suatu periode tertentu. Eka Yuliana (2019): Inflasi merupakan proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Yuliana menekankan bahwa inflasi dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat jika tidak dikelola dengan baik lembaga keuangan Islam memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan moneter dan pengendalian inflasi. Melalui penerapan prinsip-prinsip syariah dalam operasional mereka, lembaga ini tidak hanya membantu menjaga stabilitas ekonomi tetapi juga berkontribusi pada pencapaian keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang lebih merata

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis dan memahami konsep serta implementasi ekonomi syariah dalam konteks uang dan lembaga keuangan islam berdasarkan kajian literatur yang relevan. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur, seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan sumber-sumber terpercaya lainnya yang berhubungan dengan ekonomi syariah, ekonomi makro, serta teori-teori terkait uang dan lembaga keuangan islam.

Penelitian ini menganalisis berbagai hasil penelitian sebelumnya, baik yang bersifat teoretis maupun empiris, yang telah membahas uang dan lembaga keuangan islam dalam makroekonomi. Selain itu, penelitian ini juga membandingkan antara prinsip-prinsip ekonomi syariah dan ekonomi konvensional, dengan fokus pada pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kedua komponen ekonomi tersebut berfungsi dalam konteks makroekonomi. Dengan menggunakan analisis deskriptif dan komparatif, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tentang peran lembaga keuangan Islam dalam perekonomian makro, dengan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan keberlanjutan pembangunan di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim secara berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ini akan mengacu pada dua hipotesis utama dalam penelitian ini:

Peran Uang dalam Sistem Keuangan Islam

Hasil penelitian mendukung hipotesis ini dengan menunjukkan bahwa uang dalam sistem keuangan Islam bukan hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai instrumen yang

mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil dan adil. Keunikan sistem keuangan Islam adalah tidak adanya bunga (riba) yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam perekonomian. Sebagai contoh, instrumen pembiayaan seperti mudharabah dan musyarakah lebih berfokus pada bagi hasil yang adil antara pihak yang terlibat, yang pada gilirannya dapat mengurangi ketergantungan pada utang berbunga yang sering kali menyebabkan fluktuasi dalam perekonomian. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian oleh Khan (2010) yang menyatakan bahwa sistem keuangan Islam cenderung lebih stabil dan memiliki kapasitas untuk mengurangi resiko yang ditimbulkan oleh spekulasi moneter yang tinggi.

Peran Lembaga Keuangan Islam dalam Makroekonomi

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa lembaga keuangan Islam memiliki peran yang signifikan dalam mendorong inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Lembaga keuangan Islam di Indonesia memiliki akses yang lebih luas untuk membiayai sektor-sektor ekonomi yang mendukung pembangunan berkelanjutan, seperti sektor riil dan UMKM. Hal ini konsisten dengan penelitian oleh Sufian & Habibullah (2010) yang menunjukkan bahwa lembaga keuangan Islam memberikan pembiayaan yang lebih terarah pada sektor-sektor produktif dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional. Selain itu, lembaga keuangan Islam juga lebih stabil dalam menghadapi krisis ekonomi karena tidak terlibat dalam spekulasi berbasis bunga yang sering kali menyebabkan ketidakstabilan ekonomi.

Interaksi Lembaga Keuangan Islam terhadap Kebijakan Moneter dan Inflasi

Penelitian ini mendukung hipotesis kedua dengan menunjukkan bahwa instrumen keuangan Islam seperti sukuk memiliki peran penting dalam pengelolaan kebijakan moneter. Sukuk, sebagai alternatif pembiayaan berbasis aset, memberikan pemerintah alat untuk mengelola likuiditas tanpa harus bergantung pada instrumen berbasis bunga. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan Islam tidak hanya berfungsi sebagai pembiaya proyek, tetapi juga sebagai alat untuk mendukung kebijakan moneter yang lebih stabil. Penemuan ini sejalan dengan temuan oleh Beck et al. (2013) yang menunjukkan bahwa keberadaan lembaga keuangan Islam dapat memberikan alternatif stabil untuk pengelolaan moneter di negara-negara berkembang. Lembaga keuangan Islam menyediakan alternatif pembiayaan bagi sektor riil dan industri yang membutuhkan pembiayaan tanpa bunga, yang dapat mengurangi ketergantungan pada sistem perbankan konvensional. Hal ini dapat membantu menjaga kestabilan ekonomi Indonesia, karena pembiayaan yang lebih berfokus pada aset nyata mengurangi risiko inflasi yang diakibatkan oleh spekulasi dan fluktuasi harga.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan Islam memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan moneter dan makroekonomi di Indonesia, dengan memperhitungkan faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang unik di negara ini. Hasil penelitian ini memperkuat hipotesis bahwa lembaga keuangan Islam dapat berkontribusi pada perekonomian berkelanjutan melalui kebijakan pemerintah yang mendukung sektor ini. Penelitian ini juga memberikan kontribusi yang lebih dalam terkait interaksi antara lembaga keuangan Islam dan kebijakan ekonomi di Indonesia, yang membedakannya dari penelitian-penelitian terdahulu yang lebih sempit cakupannya.

SARAN

Pemerintah dan otoritas moneter perlu memperkuat regulasi serta membangun infrastruktur yang mendukung perkembangan lembaga keuangan Islam. Langkah ini mencakup harmonisasi regulasi antara sistem keuangan syariah dan konvensional untuk menciptakan integrasi yang efektif. Diperlukan edukasi yang lebih masif kepada masyarakat tentang konsep keuangan syariah, termasuk manfaat dan mekanismenya. Ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan layanan lembaga keuangan Islam. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas instrumen keuangan syariah dalam menghadapi tantangan ekonomi modern, seperti volatilitas inflasi, krisis keuangan, atau pengelolaan likuiditas.

REFERENSI

Al-Tamimi, H. A. (2019). *Financial literacy and investment decisions of UAE investors*. *The Journal of Risk Finance*, 500-516.

- Abdullah, Muhammad Ibrahim dkk. “*Service Innovation in Human Resource Management During COVID-19: A Study to Enhance Employee Loyalty Using Intrinsic Reward*,” *Frontiers in Psychology* 12, (2021)
- Abdul Basit, Veronica Sebastian, Zubair Hassan. *Impact Of Leadership Style On Employee Performance (A Case Study On A Private Organization In Malaysia)*. Malaysia : International Journal of Accounting & Business Management, 2017, Vol. V(2)
- Eka Yuliana, R., Taufik, T., & Nasrizal. (2021). *Pengaruh Kualitas Aparatur, Regulasi, Sistem Informasi Manajemen, Sistem Pengendalian Intern 97 Terhadap Efektivitas Manajemen Aset Tetap Di Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dengan Komitmen Pimpinan Sebagai Variabel Moderasi*. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), 215–225.
- Hassan, M. K., & Bashir, A.-H. M. (2003). “*Determinants of Islamic banking profitability*”, 10th ERF Annual Conference, Morocco. Economic Policy and Strategic Planning Division
- Khan, F. (2010). *Islamic Banking and Finance: On Its Way to Globalization*. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 3(4), 419-431.
- Mokhtar, E. S., & Mellett, H. (2013). *Competition, corporate governance, ownership structure and risk reporting*. *Managerial Auditing Journal*, 28(9), 838–865.
- Nanga, Muana. 2001. *Makroekonomi Teori Masalah Kebijakan*. Edisi Perdana, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.